

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*Human Development*) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP (2020), pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*), Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Teori pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave (1959), menyebutkan bahwa pada tahap pembangunan awal, pemerintah mendominasi penyediaan infrastruktur dasar, sedangkan pada tahap lanjut pengeluaran diarahkan pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Hamid, Samsir, et al., 2024), Teori modal manusia (1960) menjelaskan bahwa investasi dalam kesehatan seperti penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, program imunisasi, sanitasi, dan peningkatan akses layanan

meningkatkan kualitas kesehatan individu sehingga memperbaiki produktivitas dan kapasitas kerja masyarakat.

Teori Pertumbuhan Endogen Romer (1990) menyatakan bahwa investasi infrastruktur meningkatkan produktivitas dan kualitas modal manusia.

Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa kesejahteraan diukur dari kemampuan individu menjalani kehidupan yang bernilai. Belanja sosial meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah dalam hal ini merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari Pembangunan Manusia adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang diambil. Salah satu hal yang paling menentukan dalam suksesnya Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembangunan Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari Human Development Report (2020), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus fokus pada seluruh penduduk dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan upaya peningkatan kemampuan manusia, tetapi juga upaya untuk menggunakan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didasarkan pada empat pilar utama: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia merupakan dasar untuk menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan konsep ini, kependudukan ditetapkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Produktivitas

Penduduk harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka

dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kajian produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

2.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (Fernando et al., 2025). IPM digunakan untuk melihat sejauh mana suatu wilayah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya hidup produktif dan bermartabat.

Menurut Todaro dan Smith (2020) , IPM merupakan indikator alternatif pembangunan yang lebih holistik karena menggabungkan dimensi ekonomi dan sosial dalam satu ukuran. Mereka menegaskan bahwa pembangunan sejatinya adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial, peningkatan kualitas hidup, serta perluasan pilihan-pilihan yang dimiliki manusia.

Menurut Amartya Sen melalui *capability approach* dalam (Chandra et al., 2025), menekankan bahwa pembangunan manusia harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan dan kemampuan (*capabilities*) manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam konteks ini, IPM dipandang sebagai instrumen kuantitatif yang merepresentasikan tingkat pencapaian kapabilitas dasar manusia dalam suatu wilayah.

2.1.1.2 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Staistik (BPS) “terdapat 3 komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi pengeluaran.” IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Dimensi Kesehatan:

$$I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I \text{ Pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I \text{ Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Menghitung IPM:

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran} \times 100}$$

2.1.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian dan mencapai tujuan pembangunan. Dalam perspektif

ekonomi publik modern, kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat (Huda et al., 2024).

Teori Musgrave dalam penelitian (Mael Novariani Putri & Yani, 2022) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran publik untuk memengaruhi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Definisi ini menempatkan kebijakan fiskal sebagai bagian integral dari peran negara dalam pembangunan.

Senada dengan itu, Stiglitz (2020), menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan mekanisme utama negara dalam mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*), terutama dalam penyediaan barang publik dan layanan dasar yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial.

Dalam konteks negara berkembang Todaro dan Smith (2021) menegaskan bahwa kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat pembangunan (*development policy tool*), bukan sekadar instrumen pengendali ekonomi jangka pendek. Kebijakan fiskal yang efektif harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Belanja Pemerintah

Menurut Guritno Mangkoesebroto dalam (Siti rohima, 2020), belanja pemerintah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam

rangka menjalankan fungsi ekonomi dan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan barang dan jasa publik, tetapi juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan fungsi ekonominya, Mangkoesoebroto mengklasifikasikan belanja pemerintah ke dalam beberapa jenis utama sebagai berikut:

1. Belanja Konsumsi Pemerintah (*Government Consumption Expenditure*)

Belanja yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang manfaatnya habis dalam satu periode anggaran.

2. Belanja Investasi Pemerintah (*Government Investment Expenditure*)

Belanja yang dialokasikan untuk pembentukan modal atau aset pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat

3. Belanja Transfer (*Transfer Payments*)

Belanja pemerintah yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat tanpa adanya kewajiban balas jasa secara langsung, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.

4. Belanja untuk Pembayaran Bunga Utang (*Interest Payments*)

Belanja yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas pembayaran bunga pinjaman sebagai konsekuensi dari pembiayaan defisit anggaran.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Rostow dan Musgrave Colm & Musgrave

Model pembangunan yang dikemukakan Rostow dan Musgrave dalam (Yulianti, 2021) menjelaskan adanya hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahapan pembangunan ekonomi, yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal pembangunan, peran pemerintah cenderung dominan dalam penyediaan infrastruktur dasar guna mendorong aktivitas ekonomi. Seiring dengan berjalannya proses pembangunan, proporsi investasi swasta terhadap Produk Nasional Bruto (GNP) meningkat, sementara peran pemerintah dalam investasi fisik relatif menurun. Selanjutnya, Colm dan Musgrave dalam menyatakan bahwa pada tahap pembangunan yang lebih lanjut, pengeluaran pemerintah semakin diarahkan pada sektor-sektor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Wagner

Teori Wagner menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian, peran dan pengeluaran pemerintah cenderung mengalami peningkatan secara relatif terhadap Produk Nasional Bruto (GNP). Wagner berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi negara dalam penyediaan layanan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan,

pembangunan infrastruktur, serta jaminan sosial, yang semakin dibutuhkan seiring dengan kompleksitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, teori Wagner memberikan landasan teoretis bahwa peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor tersebut merupakan konsekuensi alami dari proses pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman memandang bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan publik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana pemerintah cenderung meningkatkan belanja untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan ekonomi, peningkatan pengeluaran pemerintah sering kali terjadi sebagai respons terhadap kebutuhan penyediaan barang dan jasa publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa pertumbuhan belanja publik tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan, sehingga relevan dalam menjelaskan variasi belanja pemerintah antarwaktu dan antarwilayah dalam mendukung pembangunan manusia.

2.1.3.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mencerminkan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan sejalan

dengan amanat konstitusi yang menetapkan porsi minimal 20 persen dari belanja negara maupun daerah (Mulawarman et al., 2023). Dalam perspektif belanja publik, pengeluaran pendidikan mencakup belanja konsumsi seperti gaji tenaga pendidik serta belanja investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan (Mangkoesoebroto, 2016).

Pendidikan merupakan komponen utama pembangunan modal manusia yang berperan penting dalam peningkatan kapabilitas dan produktivitas individu. menegaskan bahwa investasi pada pendidikan memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga belanja pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia.

2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung. Pengeluaran ini meliputi belanja konsumsi untuk pelayanan kesehatan serta belanja investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang bersifat jangka panjang (Mangkoesoebroto, 2016). Kesehatan merupakan unsur fundamental dalam pembangunan manusia karena menentukan kemampuan individu untuk beraktivitas secara produktif.

(Hamid, Samsir, et al., 2024), Teori modal manusia (1960) menjelaskan bahwa investasi dalam kesehatan seperti penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, program imunisasi, sanitasi, dan peningkatan akses layanan meningkatkan kualitas

kesehatan individu sehingga memperbaiki produktivitas dan kapasitas kerja masyarakat

2.1.3.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur

Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pengeluaran ini pada umumnya tergolong sebagai belanja investasi publik karena menghasilkan aset yang memberikan manfaat jangka panjang (Mangkoesoebroto, 2016).

Menurut (Sipayung et al., 2025), Teori pertumbuhan endogen (1980) menyatakan bahwa investasi infrastruktur meningkatkan produktivitas dan kualitas modal manusia. Ketersediaan infrastruktur yang memadai meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta memperlancar kegiatan ekonomi. Dalam konteks pembangunan manusia, belanja infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup layak sebagai salah satu dimensi IPM.

2.1.3.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Sosial

Pengeluaran pemerintah sektor sosial merupakan belanja publik yang bertujuan memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Pengeluaran ini umumnya berbentuk belanja transfer seperti bantuan sosial dan subsidi yang tidak menimbulkan kewajiban balas jasa (Mangkoesoebroto, 2016).

Belanja sosial berperan dalam mengurangi ketimpangan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran sektor

sosial berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan penulis sebagai landasan berfikir, untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
1	<i>The Influence Of Government Expenditure On The Human Development Index In Ntt Province, Marianus Antonius Deo Datus Banase, (2024)</i>	- IPM	- Pengeluaran - belanja modal - dan belanja sosial.	Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	<i>Journal of Applied Economics Vol. 9 No. 1 (2024): 109-119</i>
2	<i>The Impact of Education Spending, Health Spending, and Social Assistance Spending on the Human Development Index in West Nusa Tenggara Province in 2013-2022, Sari A N (2023)</i>	- Belanja Pendidikan - Belanja Kesehatan - Belanja sosial - IPM	- belanja modal	belanja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	<i>Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSJE) Vol. 5 No. 1 (2024)</i>
3	<i>Multiple Dimensions of Human</i>	- Belanja sosial.	- Pembangunan	Belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja	<i>IMF Elibrary, (2020)</i>

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
	<i>Development Index and Public Social Spending for Sustainable Development, Ipaliova, (2020)</i>		berkelanjutan - belanja modal	infrastruktur, dan belanja sosial berpengaruh signifikan terhadap IPM.	
4	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Ghani Rahma Febrianti, (2025)	- Belanja pendidikan - Belanja kesehatan - IPM.	- Belanja sosial - Belanja infrastuktur .	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. Belanja infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 9, No. 1, (2025)
5	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Bagi Kemiskinan di Sumba, Yuniarti Reny Renggo, (2025)	- Belanja pendidikan - Belanja kesehatan - Ipm.	- Dampak kemiskinan - Belanja sosial - Belanja infrastuktur .	belanja pendidikan berpengaruh negatif signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 25, No.1, (2025)
6	Pengaruh Belanja Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Iffah	- Belanja pendidikan - Belanja kesehatan - IPM.	- Belanja infrastuktur - Belanja modal.	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ekonomi-Qu Fakultas Ilmu Ekonomi UNISULA, (2022)

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
	Rahayu Ningsih, (2022)				
7	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Studi Pada 22 Kabupaten/Kota Di Ntt), Stefanus Paulus Ratuludji, dkk. (2023)	- belanja Pendidikan - Belanja Kesehata - Belanja Infrastruktur - IPM	- Belanja sosial.	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan. Belanja infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Edunomika Vol. 08, No. 01, (2023)
8	Simamora (2024) Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau.	- belanja pemerintah - IPM.	- belanja infrastuktur - Belanja modal.	belanja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan. Belanja pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 3, Nomor 2, (2022)
9	Pengaruh Anggaran Bidang Pendidikan Dan Anggaran Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia, Wina Muliana (2023)	- Bidang Pendidikan - Bidang Kesehatan - IPM	- belanja insfratuktur - belanja sosial.	belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ekonomi, UBJ (2023)
10	Ahmat (2025) Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang	- Bidang Pendidikan - Bidang Kesehatan - IPM. - fiskal daerah - belanja insfratuktur - belanja sosial.	- PDRB	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (Jsep), Vol 3. No 1. (2025)

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
	Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kawasan Timur Indonesia.				
11	Ferdiansyah & Febrianti, (2025) Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara.	- IPM	- Belanja pemerintah	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan, belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal BPPK Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020 Halaman 74-91
12	NOVI, (2025) Kinerja Belanja Desa Sebagai Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.	- IPM - belanja pendidikan - belanja kesehatan, - belanja insfratuktur - belanja sosial.	- belanja desa	bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan. Belanja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Analisis dan Manajemen Strategis, Vol 6, No 4, (2025)
13	Albajili & Samsuddin, (2025) Pengaruh Gini Ratio Dan Apbd Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	- IPM - belanja pendidikan - belanja kesehatan, - belanja insfratuktur - belanja sosial.	- gini ratio - APBD per kapita	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan. Belanja infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis ISSN 3064-3406 (E) Volume 02, Nomor 02, Juni (2025)
14	Pengaru pengeluaran pemerintah, terhadap IPM mediasi oleh pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di	- IPM - belanja pendidikan - belanja kesehatan - belanja infrastuktur	- Pengeluaran pemerintah	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan. Belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan. Belanja infrastruktur berpengaruh positif	Jurnal Ekonomi STIEYKPN (2022)

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
	Provinsi NTT, Adelaida Krista, (2024)	- belanja sosial.		signifikan terhadap IPM.	
15	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi serta Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Subosukawonosra ten Tahun 2014-2023, Tika Shinta Dewy, (2023)	- Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan - Belanja Kesehatan - IPM	- Akuntabilitas keuangan daerah	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, UNS (2023)
16	Aang Kusmawan, (2025) Analisis ekonomi Islam terhadap pengaruh belanja pemerintah bidang perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan transfer dana desa, terhadap tingkat kemiskinan Indonesia periode 2019-2023.	- Belanja infrastruktur - Belanja Pendidikan - Belanja kesehatan.	- transfer dana desa - kemiskina - IPM.	Belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2025)
17	Sulfayanti Fadila Mahera (2025) Analisis Kausalitas Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan	- Belanja infrastruktur.	- PDB	Belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	Economic Reviews Journal Vol 4, No 5 (2025)

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
18	Ekonomi pada 46 Negara di Dunia, Marlin (2015) Pengaruh Belanja Langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertanian Terhadap Ipm (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Propinsi NTT)	- Belanja infrastruktur - belanja pendidikan - IPM.	- Pertanian - Belanja kesehatan - Belanja sosial.	belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	WAHANA Volume 18, No. 2, Agustus (2021)

Sumber: data di olah (2025)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka.

2.2.1 Hubungan Belanja Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Teori Rostow dan Musgrave (1959), menyebutkan bahwa pada tahap pembangunan awal, pemerintah mendominasi penyediaan infrastruktur dasar, sedangkan pada tahap lanjut pengeluaran diarahkan pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pendidikan secara teoretis memiliki hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena pendidikan merupakan komponen utama dalam pembentukan modal manusia (Ferdiansyah & Febrianti, 2025). Belanja pemerintah bisa berperan penting dalam menyediakan dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, menyelenggarakan pendidikan gratis atau bersubsidi,

serta menyalurkan bantuan pendidikan dan beasiswa. Kebijakan tersebut memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan mendorong peningkatan partisipasi sekolah, sehingga berdampak pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai indikator utama dalam dimensi pendidikan IPM. Dengan demikian, peningkatan belanja pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hubungan positif antara belanja pendidikan dan IPM didukung oleh penelitian Ngakan Made Agung Aditia dan Ni Putu Martini Dewi (2018) serta Suhendi dan Ismadiyanti Purwaning Astuti (2023) yang menemukan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Selain itu, penelitian Siregar dan Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Penelitian lain oleh Putri dan Sasana (2021) juga membuktikan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, terutama melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan kualitas tenaga kerja.

2.2.2 Hubungan Belanja Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Hamid Samsir, et al., 2024), Teori modal manusia (1960) menjelaskan bahwa investasi dalam kesehatan seperti penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, program imunisasi, sanitasi, dan peningkatan akses layanan meningkatkan kualitas kesehatan individu sehingga memperbaiki produktivitas dan kapasitas kerja masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang sehat mampu berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada

gilirannya memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Belanja kesehatan bertujuan untuk pembentukan modal manusia yang produktif. Investasi kesehatan yang efektif dapat menurunkan angka kematian dan penyakit, serta meningkatkan harapan hidup indikator utama dimensi kesehatan dalam IPM. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fahraini et al., 2024) menemukan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ipm. (Julistia et al., 2025) yang menemukan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ipm. (Astuti, 2023) juga menunjukkan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ipm.

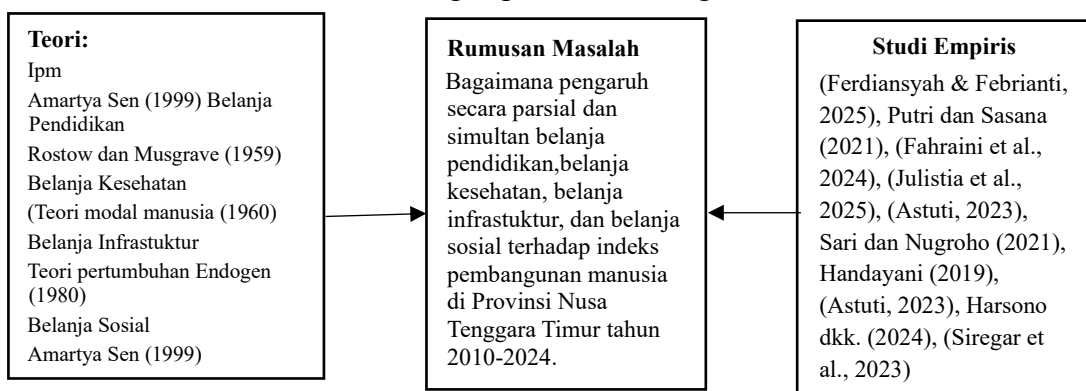
2.2.3 Hubungan Belanja Infrastruktur Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Sipayung et al., 2025), Teori pertumbuhan endogen (1980) menyatakan bahwa investasi infrastruktur meningkatkan produktivitas dan kualitas modal manusia. Infrastruktur yang memadai menurunkan biaya akses dan memperluas jangkauan layanan, sehingga berdampak pada rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan standar hidup layak tiga dimensi utama IPM. Belanja infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Sari dan Nugroho (2021), Handayani (2019). Dengan demikian, peningkatan belanja infrastruktur pemerintah berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Semakin besar dan efektif alokasi belanja infrastruktur pemerintah, maka semakin besar pula peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya nilai IPM.

2.2.4 Hubungan Belanja Sosial Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Ala, 2015), Amartya Sen (1999), menegaskan bahwa kesejahteraan diukur dari kemampuan individu menjalani kehidupan yang bernilai. Belanja sosial meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Belanja sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi bagi kelompok rentan, dan program pengurangan kemiskinan. Belanja ini secara langsung mendukung dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah bertanggung jawab menjamin standar hidup minimum, dan belanja sosial sebagai fungsi distribusi mengurangi ketimpangan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, belanja sosial berpengaruh positif terhadap IPM dilakukan (Astuti, 2023), Harsono dkk. (2024), (Siregar et al., 2023).

Maka dari itu, disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.2 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur dan belanja sosial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi nusa tenggara timur pada tahun 2010-2024.
2. Diduga secara bersama-sama belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur dan belanja sosial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi nusa tenggara timur pada tahun 2010-2024.